Judul : DPR Tunggu Konsep Pemindahan Ibu Kota

Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2019

Surat Kabar : Indo Pos

Halaman : 2

DPR Tunggu Konsep Pemindahan Ibu Kota

DPR RI menunggu pemerintah untuk menyerahkan konsep perencanaan pemindahan ibu kota. Bahkan, para wakil rakyat itupun mempertanyakan soal undang-undang wacana yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan rencana pemindahakan ibu kota Indonesia ke Kalimatan masih mentah.

"**SEKARANG** ini posisinya masih di tingkat eksekutif, di pemerintah. Tentu ini bukan hal yang sederhana ya, tapi kita beri kepercayaan kepada pemerintah untuk membuat perencanaan sebaik mungkin sematang mungkin," kata Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (21/8).

Politikus Partai Golkar itu menyebut, wacana pemindahan ibu kota baru disampaikan secara lisan oleh Presiden RI Jokowi saat sidang tahunan MPR RI. Jokowi meminta izin pada parlemen untuk memindahkan ibu kota. "Baru sebatas itu," tandasnya.

Setelah draf diserahkan ke DPR, lanjutnya, maka DPR akan melakukan pembahasan. Pembahasan utama adalah soal undang-undang (UU). Saat ini, UU masih menyatakan DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia.

Kendati konsep belum diserahkan pemerintah, Amali meyakini, wacana ini adalah wacana serius. Pasalnya, wacana ini disampaikan secara terbuka oleh Jokowi dalam sidang parlemen. Proses pembahasan pemindahan ibu kota itu dimulai dari konsep dan penyampaian rancangan undang-undang (RUU) ke pimpinan dewan.

Setelah itu, konsep dan RUU itu disampaikan dalam sebuah râpat paripurna. Selanjutnya, diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus).

"Ya, kita berikan kesempatan saja kepada pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan hal yang sudah disampaikan secara terbuka oleh Bapak Presiden," terang Amali.

Ia menyatakan, Komisi II DPR RI tak akan memberikan target atau tenggat waktu soal konsep pemindahan ibu kota.

Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto juga menagih UU terkait pemindahan ibu kota. Politikus PAN itu menyebut, untuk melakukan pemekaran kabupaten atau kota di Komisi II, butuh naskah akademik dan kajian lengkap. Namun, sampai hari ini DPR belum menerima hal tersebut.

"Sampai hari ini pemerintah belum mengajukan undang-undang untuk memindahkan ibu kota. Saya kira itu hal yang vital, hal yang urgent kalau memang mau memindahkan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (21/8).

Zainudin Amali

BERITABUANA.CO

Yandri menyebut, UU Jakarta sebagai Ibu Kota perlu dicabut. Pemerintah juga perlu mengeluarkan peraturan presiden atau peraturan pemerintah terkait status aset di Jakarta.

Maka itu, Yandri menilai, pemerintah belum secara resmi melakukan pemindahan ibu kota karena naskah RUU belum disampaikan kepada DPR. Sebab, bila belum ada aturan tersebut tapi sarana prasarana sudah dibangun, hal itu merupakan penyimpangan.

"Enggak ada perintah undang-undang untuk memerintahkan ibu kota. Negara kan bukan milik presiden, bukan milik Pak Jokowi secara kepala pemerintahan, tapi dia diperintah oleh undang-undang," jelasnya.

Ketua DPP PAN itu menilai, perlu adanya kajian mendalam terkait wacana pemindahan ibu kota. Yakni, apakah benar-benar diperlukan atau tidak. Sebab, anggaran yang besar bisa saja untuk membangun Kalimantan tanpa memindahkan Ibu Kota.

Menurutnya, fraksi di DPR sepakat akan pemindahan ibu kota. Namun, secara pribadi menilai, hal ini belum saatnya dilakukan mengingat kondisi utang negara dan ekonomi yang sedang sulit. "Kita sepakat, gak ada masalah, dan wacana pemindahan ibu kota sudah lama. Tapi, haruskah sekarang? Utang banyak atau ekonomi lagi sulit," ucapnya.

Sementara, Wakil Ketua DPR Fadli Zon berpendapat, rencana pemindahakan Ibu Kota Indonesia ke Kalimatan masih mentah. Dia juga menyebut, rencana pemindahan ibu kota Indonesia itu belum berupa rencana yang matang.

Politikus Partai Gerindara itu juga mengatakan, akibat gembar-gembor Jokowi yang hendak memindahkan Ibu Kota Indonesia, membuat masyarakat bingung. Fadli Zon menyatakan, rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia yang belum jelas itu sebagai persoalan amatiran. **(aen)**